

**DAMPAK KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BBM DAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI TERHADAP POVERTY INCIDENCE
DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2005¹**

Oleh :

Sparta²

Abstract

This paper looks at the impact of policies giving rise in fuel and BLT for the poor to the poverty level. The data sample used was Susenas 2005. The results showed that the increase in fuel has reduced the level of welfare of poor communities in West Sumatra. Giving BLT has been able to reduce poverty than before the BLT is given for the period of 2005. Despite the decrease poverty index (Headcount Index) numbers, but the BLT is not able to maintain the utility of the poor thing looks BLT funds provided is still causing undercompensate both poor urban and rural poor people in West Sumatra.

LATAR BELAKANG MASALAH

Kenaikan harga minyak yang terjadi bulan Oktober 2005 diperkirakan telah membuat tingkat kesejahteraan sebagian hidup masyarakat cenderung mengalami penurunan. Meskipun ada sebagian masyarakat yang mengalami kenaikan tingkat kesejahteraan hidupnya, namun jumlahnya diperkirakan tidak begitu banyak. Dampak kebijakan kenaikan harga minyak ini bukan tidak disadari oleh pemerintah, hal ini bias dilihat dari upaya pemerintah untuk mengurangi dampaknya. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi penurunan tingkat daya hidup dilakukan dengan program Bantuan langsung Tunai atau dikenal dengan BLT.

Program BLT diberikan khusus untuk masyarakat dengan golongan pendapatan rendah. Pemerintah melalui menteri keuangan berkeyakinan bahwa tanpa program BLT tingkat kemiskinan di Indonesia akan meningkat tajam (Wahyu, 2008). Lebih jauh, hasil penelitian LP-3M FEUI (Detik, 29 Mei 2008) mengungkapkan bahwa angka kemiskinan tahun 2009 meningkatkan tajam menjadi 41,7 juta orang atau naik sebesar 21,92%. Penurunan ini disebabkan karena kenaikan harga minyak.

Kebijakan pemerintah melalui BLT telah menimbulkan banyak kontroversi. Dari sisi pemerintah berkeyakinan program ini akan mampu meredam penurunan angka kemiskinan akibat kenaikan harga minyak. Dari sisi pihak yang kontra, kebijakan BLT diragukan mampu menurunkan angka kemiskinan (Idrus, 2010). Alasannya adalah jumlah BLT tidak sebandingkan dengan kenaikan harga, program ini telah menciptakan ketidakmandirian masyarakat, rawan penyelewengan dalam penyalurannya, sumber dana BLT yang tidak jelas, rawan penyelewengan dalam penggunaannya oleh penerima, program ini bersifat jangka pendek dan populis terkait dengan pemilu presiden tahun 2009.

¹ Tulisan ini telah diterbitkan di Jurnal Ilmiah “Jurnal Ilmu Manajemen & ekonomika” Volume 1, No.1, Desember 2011, ISSN No.2089-4309, halaman 32 – 43.

² Dosen Tetap STIE Indonesia Banking School

Dari sisi individu masyarakat, kenaikan harga BBM telah membuat daya beli menjadi turun. Mereka akan melakukan penyesuaian pola konsumsinya. Hal ini karena jumlah pendapatan tidak mengalami kenaikan. Apabila mereka harus mempertahankan tingkat utilitas sebelum kenaikan harga minyak, maka diperlukan dana kompensasi kenaikan BBM agar utilitas mereka tidak mengalami perubahan. Apabila kompensasi tidak dilakukan, maka masyarakat akan melakukan pengurangan konsumsi non makanan dan dampaknya terjadi penurunan utilitas sebagai dampak dari pendapatan (*income effect*) yang tidak mampu mempertahankan utilitas masyarakat (Nicholson, 2000). Akibat hal ini, kenaikan harga mempunyai pengaruh pada tingkat kemiskinan (*poverty effect*). Program BLT dapat digunakan sebagai dana kompensasi dari kenaikan harga minyak. Tentu tidak semua individu masyarakat dapat diberikan kompensasi secara penuh. Pemerintah telah menetapkan jumlah kompensasi dari kenaikan harga minyak diberikan kepada penduduk yang berada dalam garis kemiskinan sebesar Rp100.000 per bulan per rumah tangga (bukan per kepala).

Tabel 1.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Menurut Daerah, 2005 – 2010

Tahun	Jumlah Penduduk miskin (Jiwa)			Prosentase jumlah Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Pedesaan	Jumlah	Perkotaan	Pedesaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2005	189 300	293 500	482 800	12,45	10,08	10,89
2006	189 756	388 970	578 726	11,87	12,85	12,51
2007	149 200	380 100	529 300	9,78	13,01	11,90
2008	127 300	349 900	477 200	8,30	11,91	10,67
2009	115 780	313 480	429 250	7,50	10,60	9,54
2010	106 181	323 843	430 024	6,84	10,88	9,50

Sumber: BPS Sumatera Barat (<http://sumbar.bps.go.id/data/artikel/405/kemiskinan0710.pdf>)

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa jumlah dan prosentase penduduk miskin di Sumatera Barat sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 (Publikasi BPS Sumbar, 2010) menunjukkan penurunan pada penduduk miskin di perkotaan. Penurunan penduduk miskin di pedesaan juga mengalami penurunan sampai tahun 2009, dan naik lagi angkanya tahun 2010. Perkembangan angka kemiskinan penduduk kota dan pedesaan di Sumatera Barat menimbulkan pertanyaan apakah penurunan ini disebabkan karena program BLT atau bukan. Jawabannya memerlukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian sederhana ini mencoba menjawab masalah yang muncul diseperti kebijakan BLT dalam mengurangi angka kemiskinan akibat kenaikan harga minyak untuk provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Permasalahan yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah 1) berapa dana kompensasi yang diperlukan masyarakat SUMBAR untuk mempertahankan utilitas setelah kenaikan harga minyak, 2) berapa banyak uang pemerintah untuk memberikan kompensasi untuk semua rumah tangga akibat perubahan harga minyak, 3) berapa banyak kompensasi yang harus diberikan pemerintah untuk keluarga miskin yang berada di bawah *poverty line*, 4) berapa banyak kompensasi yang harus diberikan pemerintah bagi keluarga miskin yang berada di bawah dua kali *poverty line*, 5) bagaimana jumlah realisasi *compensation variation* yang diberikan pemerintah dalam bentuk BLT dibandingkan dengan jumlah kompensasi yang harus diberikan pemerintah, apakah terjadi *overcompensate* atau *undercompensate*, 6) bagaimana pengaruh kenaikan harga minyak terhadap *poverty*

incidences yang diukur dengan standar *calculation of poverty incidence* seperti *Headcount Index*, dan 7) bagaimana dampak kenaikan harga minyak dan BLT terhadap *poverty incidence*. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan tersebut di atas.

KERANGKA TEORI

Teori yang mendasari dalam penelitian ini adalah *Compensating Variation* dan *Poverty impact*. *Compensating variation*, CV, dapat di definsikan sebagai pengukuran dampak kesejahteraan dari perubahan harga dari P^0 ke P^1 . CV diukur dari *expenditure* (E) dari harga awal P^0 pada tingkat utility awal U^0 dikurangi pengeluaran pada harga sekarang P^1 pada tingkat utility yang sama sebelum kenaikan harga (Nicholson, 2000). CV dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$CV = E(P^0, u^0) - E(P^1 - u^0) \dots\dots\dots(1)$$

Formulasi CV dapat juga diartikan jumlah uang diperlulan untuk mengkompensasi kenaikan harga barang sebagai berikut (Nicholson, 2000):

$$CV = E(P^1, U^0) - E(P^0 - u^0) \dots\dots\dots(2)$$

CV di atas berlaku apabila $P^0 \leq P^1$. Contoh bila harga lama 10 dan harga baru 15, maka pada utility yang sama maka diperlukan dana kompensasi sebesar CV dalam hal ini adalah 5 kemudian nanti dikalikan dengan jumlah unit yang dikonsumsi sebelum kenaikan harga. Untuk mempertahankan utility diperlukan tambahan *income*, apabila *income*-nya tidak berubah maka diperlukan kompensasi sebesar nilai di atas. *Undercompensete* terjadi apa jumlah dana yang diberikan di bawah jumlah CV, kondisi sebaliknya disebut dengan *overcompensate*.

Dampak kenaikan harga terhadap *poverty* dapat dijelaskan besaran angka *real expenditure* per kapita setelah kenaikan harga sebagai berikut (Varian, 1992):

$$m^1 = \frac{1}{r} \sum_{i=1}^n P_i^0 X_i^1 \dots\dots\dots(3)$$

m^1 adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk mengkonsumsi sejumlah barang baru dengan harga lama. Ini yang disebut dengan *real expenditure*. Jika *poverty line* adalah \bar{m} , sehingga rumah tangga (*household*) dikatakan menjadi miskin ketika $m_h < \bar{m}$.

Index kemiskinan yang diukur dalam penelitian ini adalah *Headcount Index* (HI). Index ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk miskin dengan total jumlah penduduk (BPS Sumbar, 2010). Semakin tinggi angka index ini, maka semakin tinggi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

$$HI = \frac{\text{Penduduk Miskin}}{\text{Total Penduduk}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

METODOLOGI

Penelitian sederhana ini mengambil data sampel dari data SUSENAS tahun 2005 yang terdiri dari 1820 rumah tangga, dengan jumlah sampel penduduk perkotaan 1278 rumah tangga dan jumlah sampel penduduk pedesaan 542 rumah tangga (rincian data lihat lampiran Data Susenas untuk provinsi Sumbar). Kriteria penduduk miskin digunakan adalah jumlah

pendapatan per kapita per tahun kurang dari Rp1.800.000 (poverty line 1) dan pendapatan per kapita per tahun kurang dari Rp3.600.000 (dua kali garis kemiskinan disebut dengan poverty line 2).

Data sampel yang diambil dari data susenas di olah dengan menggunakan *spreadsheet software* (EXCEL). Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data sehingga diperoleh gambaran jawaban permasalahan di atas adalah sebagai berikut 1) Menentukan kenaikan harga BBM dalam bulan Oktober 2010, 2) Menentukan Harga BBM sebelum dan setelah kenaikan, 3) Menentukan *Compensation variation* dari kenaikan BBM untuk setiap sampel *household* di perkotaan dan pedesaan di Sumatera barat, 4) *Compensation variation* ditentukan dengan mengalikan perubahan harga dengan unit konsumsi BBM sebelum kenaikan harga BBM untuk masing-masing *household*. Untuk mendapatkan rata-rata tertimbang jumlah kompensasi BBM, maka bobot (*weight*) setiap *household* dikalikan dengan CV masing-masing *household*. Hasil perkalian ini dibagi dengan angka *weight*, sehingga diperoleh rata-rata tertimbang jumlah kompensasi BBM akibat kenaikan harga BBM. Data sampel dibagi kedalam kedua kelompok yaitu miskin atau tidak miskin. Kelompok miskin dan tidak miskin diperoleh dengan membandingkan jumlah *Y* masing-masing *household* dengan kriteria *poverty line 1* dan *poverty line 2*. BLT diberikan kepada penduduk miskin.

Undercompensate dan *overcompensate* dihitung dengan menggunakan formula (2) di atas. Dalam hal ini BLT digunakan sebagai dana untuk kompensasi atas kenaikan harga BBM agar utility masyarakat tidak turun. *Undercompensate* akan menyebabkan penurunan utility masyarakat sehingga mengurangi tingkat kesejahteraannya. Hal ini akan berdampak pada penambahan jumlah penduduk miskin. *Headcount index* dihitung dengan menggunakan formula (4) di atas.

Dampak BLT terhadap tingkat kemiskinan akan diuji dengan membandingkan *headcount index* sebelum dan sesudah BLT diberikan dan membandingkan jumlah penduduk miskin sebelum BLT dan setelah BLT. Apabila Berdasarkan prediksi di atas, dengan kriteria kemiskinan yang kedua, jumlah dana kompensasi disalurkan diperkirakan makin besar dengan *undercompensate* yang semakin tinggi juga bila dibandingkan dengan kriteria kemiskinan yang pertama.

Apabila angka indek turun setelah BLT, maka dampak BLT dapat mengurangi angka kemiskinan akibat kenaikan harga BBM.

HASIL DAN ANALISIS

Gambaran Sampel

Gambaran sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 2. Data pola konsumsi sampel di SUMBAR seperti premium (Bbm 1), minyak tanah (Bbm3), solar (Bbm4), makanan (Totmak) dan non makanan (totbknmak), jumlah kepala setiap *Hshould* (*Hhsize*) diperoleh dari hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2005. Jumlah *household* (*Hs*) yang diambil adalah 1820 *Hs* dengan jumlah kepala adalah 7734 orang. Rata-rata tertimbang income perkapita per tahun untuk samplerumah tangga adalah Rp13.742.197,05 atau Rp1.145.183,09 per bulan (lihat lampiran hasil olahan *software Microsoft Excel*). Rata-rata pendapatan tertimbang rumah tangga untuk penduduk kota sebesar Rp11.635.690 atau di bawah (84,67%) rata-rata penduduk kota dan desa. Sedangkan rata-rata pendapatan tertimbang penduduk desa adalah Rp18.897.556, artinya penduduk desa di Sumbar jumlah rata-rata tertimbang pendapatan per rumah tangga lebih tinggi dari penduduk kota.

Tabel 2.
Sampel, Rata-rata Income, Rata-rata tertimbang pemakaian BBM,
Jumlah Penduduk Miskin sebelum BLT
Provinsi Sumatera barat
Tahun 2005

Keterangan	Penduduk		
	Perkotaan	Pedesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Sampel Hhould	1.278	542	1.820
Sampel per kepala	5.465	2.269	7.734
Rata-rata tertimbang Income per Hsh (Rp)	11.635.690	18.897.556	137.42.196
Rata2 tertimbang Y per kepala (Rp)	2.978.041	5.286.998	3.639.775
Rata-rata tertimbasng pemakaian BBM (Rp)	353.896	751.147	473.586
Jumlah Hhould miskin sebelum BLT	290	34	324
Jumlah miskin per kepala sebelum BLT	1.547	206	1.753

Sumber: diolah sendiri dari data Susenas 2005

Apabila dilihat dari rata-rata *income* perkapita (per kepala) dari sampel gabungan penduduk kota dan desa adalah Rp3.639.775. jumlah ini menunjukkan bawah rata-rata pendapatan per kapita (per kepala) di atas garis kemiskinan Rp1.800.000 per tahun atau di atas dua kali garis kemiskinan Rp3.600.000. Untuk penduduk kota rata-rata pendapatan per kepala adalah Rp2.978.041 per tahun, atau masih di atas garis kemiskinan dan di bawah dua kali garis kemiskinan (poverty line 2). *Income* per kapita sampel untuk penduduk desa lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk kota yaitu Rp5.286.998 atau di atas garis kemiskinan baik line satu maupun lined dua. Artinya secara rata-rata penduduk desa lebih sejahtera dibandingkan dengan penduduk kota berdasarkan sampel ini. Hal ini terlihat jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk desa, baik rumah tangga maupun per kepala pada tingkat garis kemiskinan di bawah Rp1.800.000 per tahun.. Akibat tingginya pendapatan pada penduduk desa, jumlah pemakaian BBM oleh penduduk desa lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk kota. Rata-rata tertimbang pemakaian BBM oleh penduduk desa per tahun adalah Rp751.147 atau 2,12 kali pemakaian penduduk kota atau 1,59 kali pemakaian rata-rtata BBM total penduduk.

Kompensasi Atas Kenaikan BBM

Kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005, telah menurunkan tingkat daya beli masyarakat. Untuk mempertahankan utilitas masyarakat agar tingkat kesejahteraannya tidak menurun, diperlukan jumlah kompensasi atas kenaikan ahrga minyak ini. Jumlah kompensai yang diperlukan dari hasil perhitungan excel (terlampir) dan dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan data sampel Jumlah kompensasi yang diperlukan untuk penduduk kota dan desa adalah secara keseluruhan adalah Rp245.056.737 per bulan. Dari jumlah ini Rp170.464.220 per bulan dana kompensasi diperlukan oleh penduduk kota untuk mempertahankan utilitasnya dan sisanya Rp74.592.517 diperlukan untuk pendduduk desa di Sumbar. Sebagian besar dana kompensasi ini diperlukan bagi penduduk kota di sumbar, karena tingkat rata-rata tertimbang pendapatan di kota lebih rendah dibandingkan dengan penduduk desa (lihat tabel 2 di atas). Apabila dihitung rata-rata tertimbang kebutuhan dana kompensasi per rumatangga, maka rata-rata tertimbang dana kompensasi yang diperlukan secara keseluruhan adalah **Rp134.240 per bulan**, rata-rata tertimbang dana kompensasi yang diperlukan per rumahtaangga untuk penduduk kota adalah **Rp133.161 per bulan** dan untuk penduduk desa **Rp137.033 per bulan**.

Prediksi Total Dana Kompensasi Akibat Kenaikan Harga BBM

Apabila rata-rata tertimbang total dana kompensasi per bulan ini digunakan sebagai dasar prediksi pemberian dana kompensasi oleh pemerintah, maka jumlah dana yang diperlukan untuk kompensasi BBM bagi masyarakat kota dan desa tanpa melihat kategori miskin atau tidak, adalah rata-rata tertimbang kompensasi Rp134.240 per bulan dikalikan dengan jumlah sampel rumah tangga 1820 yaitu Rp244.316.800. Kalau digunakan untuk data populasi penduduk miskin di Sumatera Barat tahun 2005 (lihat tabel 1 di atas) sebesar 482.800 jiwa atau 89.233 (=482.800 x 324/1753³) rumah tangga, maka total dana kompensasi yang harus dibayarkan kepada masyarakat miskin di Sumbar tahun 2005 per bulan diperkirakan adalah sebesar **Rp11.978.637.920** (=Rp134.240/bulan x 89.233 rumah tangga) dari jumlah ini dibagikan untuk penduduk miskin kota di Sumbar **Rp10.721.620.360** (=Rp11.978.637.920 x (290/324⁴)) sisanya **Rp 1.257.017.560** (=Rp11.978.637.920-Rp10.721.620.360) untuk penduduk miskin yang di pedesaan.

Tabel 3.
Kompensasi Atas kenaikan BBM
Penduduk kota dan Desa di Sumatera Barat
Tahun 2005

keterangan	Poverty Line 1			Poverty Line 2		
	Perkotaan	Pedesaan	Total	Perkotaan	Pedesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total kompensasi yg harus diterima per bulan karena BBM naik	170.464.220	74.592.517	245.056.737	170.464.220	74.592.517	245.056.737
Rata-rata tertimbang total kompensasi per bulan	133.161	137.033	134.240	133.161	137.033	134.240
Total kompensasi seharusnya diterima orang miskin per bulan	30.312.728	5.409.719	35.722.446	127.026.606	36.636.710	163.663.316
Rata2 tertimbang kompensasi yg harus diterima orang miskin per bulan	104.744	159.059	110.113	129.275	17.8415	137.154
Jumlah kompensasi dari pemerintah (BLT) per bulan	29.000.000	3.400.000	32.400.000	98.400.000	20.400.000	118.800.000
Total overcompensate (undercompensate)	-1.312.728	-2.009.719	-6.660.893	-28.626.605	-16.236.710	-44.863.316
Jumlah HShs overcompensate	182	11	193	543	60	603
Jumlah HShs overcompensate	108	23	131	441	144	585

Sumber: diolah sendiri dari data Susenas 2005

³ Data populasi penduduk miskin dalam jiwa di jadikan rumah tangga dengan menggunakan prosentase rumah tangga sampel dan jumlah jiwa dalam sampel yaitu 324/1753.

⁴ Prosentase penduduk miskin kota dengan total penduduk miskin seblum BLT sesuai sampel

Prediksi dana Kompensasi kenaikan BBM (BLT) Yang harus Diberikan pemerintah untuk penduduk Miskin di Sumbar

Kriteria Miskin Income per kapita <Rp1.800.000 per tahun.

Dari data sampel (tabel 3), diperoleh dana kompensasi yang harus diberikan untuk penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (pendapatan rumah tangga di bawah Rp1.800.000 per tahun) adalah Rp35.722.446 per bulan dengan rincian untuk penduduk kota Rp30.312.728 dan Rp5.409.719. Rata-rata tertimbang dana kompensasi per bulan per rumah tangga untuk penduduk miskin ini adalah Rp110.113 untuk kota dan desa dengan rincian Penduduk Kota Rp 104.744 dan penduduk desa Rp 159.059.

Angka rata-rata tertimbang dana kompensasi untuk penduduk miskin sesuai sampel diatas digunakan dalam menentukan prediksi dana kompensasi yang seharusnya diberikan kepada penduduk miskin (populasi sesuai data tabel 1 di atas), Jumlah prediksi dana kompensasi BBM disebut Bantuan Lansung Tunai (BLT) untuk penduduk miskin di sumbar tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- 1). Prediksi Dana kompensasi seharusnya untuk penduduk miskin kota dan desa di sumbar:
= $Rp110.113 \times (482.800 \times 324/1753) = Rp110.113 \times 89.233$ rumah tangga
= **Rp9.825.713.329** per bulan
- 2). Prediksi Dana kompensasi seharusnya untuk penduduk miskin kota di sumbar:
= $Rp9.825.713.329 \times (290/324) =$ **Rp8.794.619.955** per bulan
- 3). Prediksi Dana Kompensasi seharusnya untuk penduduk miskin kota di Sumbar:
= $Rp9.825.713.329 - Rp8.794.619.955 =$ **Rp1.031.093.374** per bulan

Kriteria Miskin Income per kapita < Rp3.600.000 per tahun.

Dari data sampel (tabel 3), diperoleh dana kompensasi yang harus diberikan untuk penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (pendapatan rumah tangga di bawah Rp3.600.000 per tahun) naik menjadi adalah Rp163.663.316p per bulan sebelum nya Rp35.722.446 dengan rincian untuk penduduk kota Rp127.026.606 dan Rp36.636.710. Rata-rata tertimbang dana kompensasi per bulan per rumah tangga untuk penduduk miskin ini adalah Rp137.154 untuk kota dan desa dengan rincian penduduk kota Rp129.275 dan penduduk desa Rp178.415.

Angka rata-rata tertimbang dana kompensasi untuk penduduk miskin sesuai sampel diatas digunakan dalam menentukan prediksi dana kompensasi yang seharusnya diberikan kepada penduduk miskin (populasi sesuai data tabel 1 di atas), Jumlah prediksi dana kompensasi BBM disebut BLT untuk penduduk miskin di sumbar tahun 2005 dengan kriteria miskin di pendapatan di bawah Rp3.600.000 per tahun adalah sebagai berikut:

- 1). Prediksi Dana kompensasi seharusnya untuk penduduk miskin kota dan desa di sumbar:
= $Rp137154 \times (482.800 \times 1188/5498) = Rp137.154 \times 104.322$ rumah tangga
= **Rp14.308.179.590** per bulan
- 2). Prediksi Dana kompensasi seharusnya untuk penduduk miskin kota di sumbar:
= $Rp14.308.179.590 \times (984/1188) =$ **Rp11.851.219.460** per bulan
- 3). Prediksi Dana Kompensasi seharusnya untuk penduduk miskin kota di Sumbar:
= $Rp14.308.179.590 - Rp11.851.219.460 =$ **Rp2.456.960.130** per bulan

Prediksi Uncompensate dan Overcompensate atas BLT

Dari data sampel penelitian (tabel 3 di atas) terlihat bahwa pemberian BLT untuk penduduk miskin kota dan desa adalah sebagai berikut:

1). Kriteria miskin income per tahun <Rp1.800.000

Jumlah BLT yang diberikan untuk kota dan desa totalnya adalah Rp32.400.000 sedangkan jumlah dana kompensasi yang seharusnya diberikan kepada penduduk miskin kota dan desa adalah Rp35.722.446 sehingga terjadi *undercompensated* untuk penduduk kota dan desa di sumbar sesuai sampel adalah Rp6.660.893. Sedangkan untuk BLT yang disalurkan untuk penduduk miskin kota adalah Rp29.000.000 atau terjadi *undercompensate* sebesar Rp1.312.728 dan begitu juga untuk pemberian BLT bagi penduduk miskin di desa sebesar Rp3.400.000 terjadi *undercompensated* sebesar Rp2.009.719. Terjadinya *undercompensate* dalam pemberian BLT bagi penduduk miskin di Sumbar belum sepenuhnya dapat mempertahankan tingkat kesejahteraan penduduk secara total, meskipun ada sebagian masyarakat mengalami *overcompensate*, namun ada sebagian masyarakat mengalami *undercompensate*.

Apabila data-data sampel ini digunakan untuk memprediksi *undercompensate* dan *overcompensate* pemberian BLT tahun 2005, maka dapat dihitung sebagai berikut:

Prediksi under/overcompensate Penduduk Miskin Kota dan Desa

1). Prediksi BLT yang diberikan:

$$= \text{Rp}100.000 \times 89.233 = \text{Rp}8.923.300.000$$

2). Prediksi Dana Kompensasi yang harus diterima

$$(\text{lihat perhitungan sebelumnya}) \quad = \text{Rp}9.825.713.329$$

3). Prediksi Undercompensate BLT sebesar **= Rp 902.413.329**

Prediksi under/overcompensate Penduduk Miskin Kota Saja

1). Prediksi BLT yang diberikan:

$$= \text{Rp}100.000 \times 89.233 (290/324) = 100.000 \times 79.869 = \text{Rp}7.986.900.000$$

2). Prediksi Dana Kompensasi yang harus diterima

$$(\text{lihat perhitungan sebelumnya}) \quad = \text{Rp}8.794.619.955$$

3). Prediksi Undercompensate BLT sebesar **= Rp 807.719.955**

Prediksi under/over Compensate Penduduk Miskin Desa Saja

1). Prediksi BLT yang diberikan:

$$= \text{Rp}100.000 \times 89.233 (34/324) = 100.000 \times 9.364 = \text{Rp} 936.400.000$$

2). Prediksi Dana Kompensasi yang harus diterima

$$(\text{lihat perhitungan sebelumnya}) \quad = \text{Rp}1.031.093.374$$

3). Prediksi Undercompensate BLT sebesar **= Rp 94.693.374**

2). Kriteria miskin Income per tahun <Rp3.600.000

Berdasarkan kriteria miskin yang kedua ini, jumlah BLT yang diberikan untuk kota dan desa totalnya adalah Rp118.800.000 sedangkan jumlah dana kompensasi yang seharusnya diberikan kepada penduduk miskin kota dan desa adalah Rp163.663.316 sehingga terjadi *undercompensated* untuk penduduk kota dan desa di sumbar sesuai sampel adalah Rp44.863.316. Sedangkan untuk BLT yang disalurkan untuk penduduk miskin kota adalah Rp98.400.000 atau terjadi *undercompensate* sebesar Rp28.626.605 dan begitu juga untuk pemberian BLT bagi penduduk miskin di desa sebesar Rp20.400.000 terjadi *undercompensate* sebesar Rp16.236.710. Terjadi peningkatan BLT yang diberikan

dibandingkan dengan criteria pertama tentang garis kemiskinan. Terjadinya *undercompensate* dalam pemberian BLT bagi penduduk miskin di Sumbar mengindikasikan bahwa dana BLT yang diberikan belum sepenuhnya dapat mempertahankan tingkat kesejahteraan penduduk secara total, meskipun ada sebagian masyarakat mengalami *overcompensate*, namun sebagian besar masyarakat mengalami *undercompensate*.

Apabila data-data sampel ini digunakan untuk memprediksi *undercompensate* dan *overcompensate* pemberian BLT tahun 2005 dengan kriteria miskin income <Rp3.600.000, maka dapat dihitung sebagai berikut:

Prediksi *under/overcompensate* Penduduk Miskin Kota dan Desa

- 1). Prediksi BLT yang diberikan:
= Rp100.000 x 104.322 = Rp10.432.200.000
- 2). Prediksi Dana Kompensasi yang harus diterima
(lihat perhitungan sebelumnya) = Rp14.308.179.590
- 3). Prediksi *Undercompensate* BLT sebesar = **Rp 3.875.979.590**

Prediksi *under/overcompensate* Penduduk Miskin Kota Saja

- 1). Prediksi BLT yang diberikan:
= Rp100.000 x 104.322 (984/1188) = 100.000 x 86.408 = Rp8.640.800.000
- 2). Prediksi Dana Kompensasi yang harus diterima
(lihat perhitungan sebelumnya) = Rp11.851.219.460
- 3). Prediksi *Undercompensate* BLT sebesar = **Rp 3.210.419.460**

Prediksi *under/over Compensate* Penduduk Miskin Desa Saja

- 1). Prediksi BLT yang diberikan:
= Rp100.000 x 104.322 (204/1188) = 100.000 x 17.913 = Rp1.791.300.000
- 2). Prediksi Dana Kompensasi yang harus diterima
(lihat perhitungan sebelumnya) = Rp2.456.960.130
- 3). Prediksi *Undercompensate* BLT sebesar = **Rp 665.660.130**

Bila dibandingkan dengan kriteria kemiskinan yang pertama, prediksi dengan kriteria kemiskinan yang kedua, menunjukkan jumlah dana kompensasi yang disalurkan diperkirakan semakin besar dengan *undercompensate* yang semakin tinggi pula..

Dampak BLT terhadap Kemiskinan

Pemberian BLT kepada masyarakat miskin kota dan desa di Sumbar diperkirakan dapat mempengaruhi angka kemiskinan yang ada dalam tahun 2005. Hal ini dapat dilihat berdasarkan indeks *headcount* dan jumlah penduduk yang berada dalam taraf kemiskinan.

Tabel 4
Index Kemiskinan Sebelum dan Setelah BLT
Penduduk Kota dan Desa Provinsi Sumatera barat
Tahun 2005

Keterangan	Poverty Line 1			Poverty Line 2		
	Perkotaan	Pedesaan	Total	Perkotaan	Pedesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Headcount index perhousehold sebelum BLT	22,69%	6,27%	17,8%	77%	37,64%	65,25%
Headcount index per kepala sebelum BLT	28,31	9,08%	22,67	81,85%	45,17%	71,08%
Headcount index perhousehold setelah BLT	12,28%	2,95%	9,5%	68,08%	30,81%	56,98%
Headcount index per kepala setelah BLT	17,93%	5,07%	14,16%	76,32%	39,36%	65,48%

Sumber: diolah sendiri dari data Susenas 2005

Kenaikan harga minyak telah mempengaruhi angka indeks kemiskinan dengan menggunakan *headcount Index*. Berdasarkan tabel 5, terlihat bahwa angka indeks dengan adanya kenaikan harga minyak sebelum BLT dibandingkan dengan setelah BLT menunjukkan bahwa angka indeks mengalami penurunan baik dengan kriteria kemiskinan pertama maupun yang kedua. *Headcount Index* dengan criteria kemiskinan yang pertama untuk penduduk rumah tangga Desa dan Kota sebelum BLT adalah 17,89% turun menjadi 9,5%. Begitu juga untuk *headcount index* rumah tangga kota saja dan desa saja juga mengalami penurunan. Penurunan yang paling banyak adalah rumah tangga desa saja yaitu turun lebih dari separuhnya dari 6,27% turun menjadi 2,95%. Pada kriteria kemiskinan kedua, indeks ini juga mengalami penurunan yaitu 65,25% turun menjadi 56,98%. Meskipun penurunannya tidak setajam kriteria miskin kelompok pertama.

Tabel 5
Jumlah Angka Kemiskinan Sebelum dan Setelah BLT
Penduduk Kota dan Desa Provinsi Sumatera barat
Tahun 2005

keterangan	Poverty Line 1			Poverty Line 2		
	Perkotaan	Pedesaan	Total	Perkotaan	Pedesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Hhould miskin sebelum BLT	290	34	324	984	204	1188
Jumlah miskin per kepala sebelum BLT	1547	206	1753	4473	1025	5498
Jumlah miskin setelah BLT per Hshould	157	16	173	870	167	1037
Jumlah miskin setelah BLT per kepala	980	115	1095	4171	183	5064

Sumber: diolah sendiri dari data Susenas 2005

Kenaikan BBM dan BLT juga memberikan dampak pada angka kemiskinan di Sumbar. Dari data sampel yang di olah di lampiran exel untuk kedua kelompok criteria kemiskinan kota dan desa serta masing-masingnya, terlihat jumlah angka penduduk miskin untuk kelompok pertama turun drastis dari 324 rumah tangga miskin sebelum kenaikan BBM dan BLT menjadi 173 rumahtangga. Atau turun sebesar 46,6% (lihat tabel 5). Penurunan angka kemiskinan juga dialami oleh rumah tangga kota saja dan desa saja. Penurunan yang paling tajam terjadi pada rumahtangga diperkotaan di Sumbar yaitu dari 290 rumahtangga miskin menjadi hanya 157 rumah tangga miskin. Atau turun sebesar 84,7% dari

sebelumnya. Penurunan jumlah rumah tangga miskin juga diiringi dengan penurunan penduduk miskin per kepala yaitu dari 1.753 jiwa menjadi 1.095 jiwa, suatu penurunan yang tinggi yaitu penurunan sebesar 60% dari sebelumnya. Pada kelompok ke dua jumlah angka kemiskinan setelah harga BBM naik dan BLT juga mengalami penurunan, namun penurunannya tidak sebesar kelompok pertama, hal ini disebabkan banyak penduduk memiliki pendapatan rata-rata jauh di bawah Rp3.600.000 per tahun, sehingga bantuan BLT tidak banyak pengaruhnya dibandingkan dengan kelompok pertama. Karena sebagian besar penduduk Sumbar baik di kota maupun di desa memiliki income percapita di atas Rp1.600.000 per tahun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian sederhana di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah rata-rata tertimbang kompensasi BBM yang diperlukan untuk penduduk kota dan desa tahun 2005 di Sumbar adalah Rp134.240 rumah tangga kota dan desa, Rp133.161 untuk rumah tangga kota saja dan Rp137.033 rumah tangga desa saja.
2. Hasil prediksi jumlah dana kompensasi yang harus diberikan pemerintah untuk semua rumah tangga di Sumbar akibat kenaikan BBM agar utility masyarakat tetap tahun 2005 adalah **Rp11.978.637.920 per bulan.**
3. Perkiraan jumlah dana kompensasi yang harus diberikan pemerintah untuk keluarga miskin yang berada di bawah poverty line adalah sebesar **Rp9.825.713.329 per bulan**
4. Perkiraan jumlah dana kompensasi yang harus diberikan pemerintah bagi keluarga miskin yang berada di bawah dua kali poverty line adalah **Rp14.308.179.590 per bulan.**
5. Jumlah realisasi BLT yang diberikan untuk masyarakat miskin di kota dan desa menimbulkan *undercompensated* baik criteria miskin pertama ataupun criteria miskin kedua, sehingga BLT belum mampu menjaga utiliti masyarakat sama dengan sebelum menaikkan harga BBM sehingga terjadi penurunan kualitas hidup masyarakat di kota dan desa di Sumbar selama tahun 2005.
6. Terjadi penurunan angka *indek headcount* setelah BLT sehingga BLT dapat mengurangi angka indek ini.
7. Kenaikan harga minyak dan BLT telah memberikan dampak kepada terhadap *poverty incidence*. Hal ini terlihat dari penurunan angka kemiskinan setelah BLT diberikan pemerintah.

Sehubungan dengan hasil di atas, maka disarankan agar pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan BLT untuk kompensasi kenaikan harga BBM, karena jumlah yang diberikan masih di bawah yang dibutuhkan masyarakat miskin, sehingga terjadi penurunan kualitas hidup masyarakat miskin di Sumbar, hal ini terlihat adanya *undercompensate* dari BLT yang diberikan.

REFERENSI

- Bdan Pusat Statistik (2010), "Profil kemiskinan Provinsi Sumatera Barat tahun 2010", *Berita Resmi Statistik* No.34/07/13/Th.XIII/ tanggal 1 Juli 2010 BPS Sumatera Barat, <http://sumbar.bps.go.id/data/artikel/405/kemiskinan0710.pdf>.
- Daniel, Wahyu (2008), "Menkeu Nyakin tanpa BLT Kemiskinan Meroket", *Detik-Finance*, <http://www.detikfinance.com/read/2008/05/29/163306/947234/4/menkeu-yakin-tanpa-blt-angka-kemiskinan-meroket>, Kamis 29 Mei 2008.
- <http://www.padang.go.id/v2/content/view/3599/180/> Penduduk Miskin dan Alokasi Dana Program Pengentasan Kemiskinan.
- Idrus (2009), "Alasan Mengapa BLT Harus Dihapuskan" <http://idrus.net/2009/07/10/alasan-mengapa-blt-harus-dihapuskan.shtml>.
- Nicholson, Walter (2000), *Macro Economic Theory – Basic Principle and Extension, Eight Edtion*, Canada: South Western-Thomson Learning.
- Varians, Hal.R, (1992), *Microeconomic Analysis, Third Edition*, USA: WW.Norton & Company, Inc-International Student Edition.